

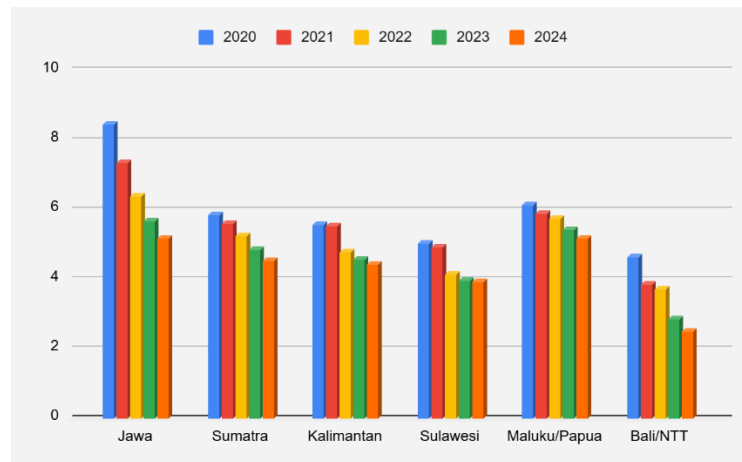
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang bertujuan untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan, pemerataan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Setidaknya ada 3 masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran (Adam et al., 2025), dimana tantangan tersebut tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi negara maju juga terjadi masalah dinamika pasar tenaga kerja (Priastiwi & Handayani, 2019).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tekanan serupa terutama masih tingginya tingkat pengangguran, dimana pada bulan agustus 2025 tercatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi berada pada angka 4,85% (BPS, 2025). Pengangguran dipandang sebagai masalah makroekonomi karena menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan terhambatnya pemanfaatan sumber daya produktif. (Osman et al., 2015). Hal serupa di sampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang dalam angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, atau merasa putus asa tidak memperoleh pekerjaan.



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Data Dasar Regional Bappenas 2025 (data diolah).

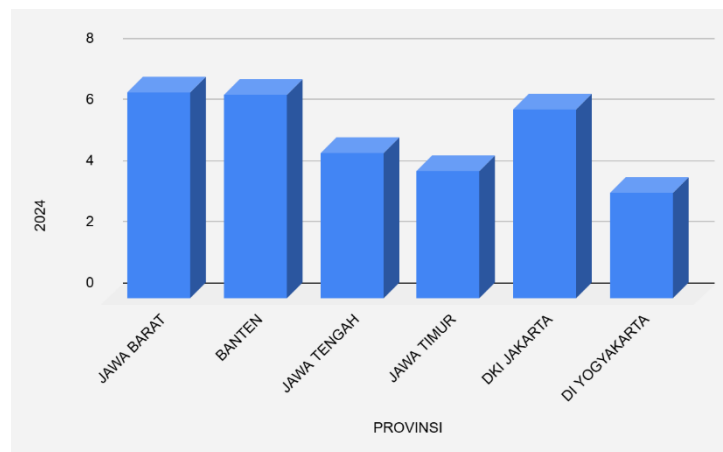
Gambar 1. 1 Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Dari data di atas diketahui bahwa, perkembangan tingkat pengangguran di antar pulau di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi pada periode 2020–2023, yaitu pada kisaran 8,48%–5,69%, dan pada tahun 2024 hanya sedikit lebih rendah 1% dibandingkan Pulau Maluku/Papua yang mencapai 6,19%, setelah itu, diikuti oleh Pulau Sumatra 4,56%, Kalimantan 4,42%, Sulawesi 3,94%, dan yang terendah adalah Pulau Bali/NTT dengan tingkat pengangguran sebesar 2,51% (SIMREG, 2024). Variasi ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga memiliki karakteristik regional yang berbeda-beda.

Kondisi pengangguran di tiap Pulau ini diperparah akibat adanya pandemi Covid-19 pada 2020. Kebijakan pembatasan mobilitas menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti, rantai produksi terganggu, dan angka PHK melonjak, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat tajam (Darmawan & Mifrahi, 2022). Menurut Hukum Okun, meningkatnya pengangguran akan menurunkan output perekonomian, di mana kenaikan 1 persen tingkat pengangguran dapat

menekan GNP hingga 2 persen. Pemerintah merespons melalui program pelatihan, peningkatan investasi, hingga pembangunan infrastruktur, termasuk program Prakerja yang menysasar pencari kerja dan pekerja terdampak PHK (Muhyiddin et al., 2022).

Namun demikian, data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang konsisten. Berikut merupakan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah).

Gambar 1. 2 Rata-Rata Tingkat Pengangguran berbagai Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 (%)

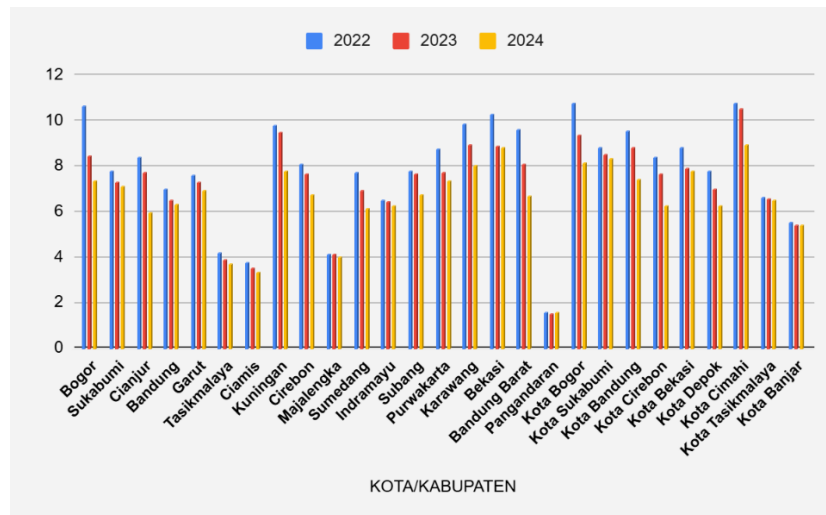
Data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa bahkan di Indonesia pada tahun 2024, yaitu 6,75%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa, seperti Banten yang mencatatkan angka pengangguran 6,68% yang disebabkan oleh adanya realokasi pabrik besar-besaran, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan banyaknya terjadi PHK (CBNC Indonesia, 2024). Selanjutnya diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat pengangguran sebesar 6,21% yang disebabkan oleh PHK yang tinggi, transformasi digital dan

penurunan permintaan, serta diakibatkan oleh adanya efek domino dari Jabodetabek (GoodStats, 2025). Selanjutnya tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa diikuti oleh Jawa Tengah dengan 4,78%, Jawa Timur 4,19%, dan DI Yogyakarta 3,48%. Jika dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa yang juga mencatat tingkat pengangguran tinggi, Jawa Barat tetap berada di posisi teratas, misalnya Papua Barat Daya dan Papua 6,48%, Kepulauan Riau 6,39%, Maluku 6,11%, Sulawesi Utara 5,85%, Aceh 5,75%, dan Sumatra Barat 5,75%. Artinya, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional.

Tingginya pengangguran di Jawa Barat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, terbatasnya kesempatan kerja, melemahnya konsumsi masyarakat, serta PHK massal di sejumlah sektor. Faktor sosial-demografi seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketidaksesuaian keterampilan kerja, tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja, tingginya upah minimum, dan urbanisasi juga turut memperburuk kondisi ini.(Adipratomo et al., 2024). Padahal, Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kuat, kawasan investasi strategis, dan salah satu pusat industrialisasi nasional, namun peningkatan ekonomi dan investasi tersebut belum cukup menurunkan tingkat pengangguran (rakyatpriangan.com, 2025).

Selain itu, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 50.345.200 jiwa, dengan luas wilayah 35.377,76 km². Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2023, Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Setiap wilayah menunjukkan tingkat pengangguran yang berbeda-beda,

sehingga penting untuk melihat dinamika pengangguran secara lebih spesifik pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah).

Gambar 1. 3 Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2022-2024 (%).

Dari grafik di atas, diketahui terjadi fluktuasi tingkat pengangguran yang cukup beragam di Jawa Barat. Sebagian besar kabupaten/kota masih mencatat angka yang relatif tinggi, terutama wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Kota dengan rata-rata tingkat pengangguran mencapai 8,94%. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, tingginya arus migrasi pencari kerja ke kawasan industri, serta adanya persyaratan khusus dan praktik pencaloan yang membatasi akses tenaga lokal (Rahmawati & Nurwati, 2021).

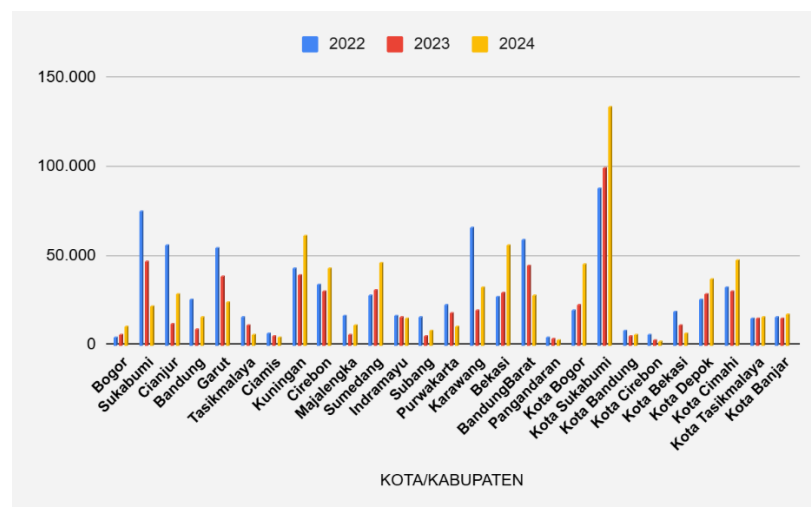
Perbedaan mencolok juga tampak antara kota dan kabupaten yang saling berdekatan. Kota cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan kabupaten penyangga. Misalnya, Kota Bogor yang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi yaitu sebesar 8,13% dibanding Kabupaten Bogor sebesar

7,34%. Fenomena ini menggambarkan pengangguran urban akibat urbanisasi yang tidak sebanding dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, wilayah non-industri seperti Kota Cimahi juga tetap mencatat pengangguran tinggi dengan rata-rata 10%, yang mengindikasikan adanya masalah struktural ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan basis agraris seperti Ciamis, Pangandaran, dan Majalengka mencatat tingkat pengangguran yang lebih rendah dengan rata-rata 3,15%, yang dipengaruhi oleh aktivitas pertanian dan usaha mikro yang relatif stabil.

Secara keseluruhan, tren tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada 2022-2024 menunjukkan perbaikan, namun angkanya tetap tinggi karena masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengangguran di Jawa Barat dipengaruhi oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta ketimpangan investasi yang masih terpusat di wilayah tertentu.

Pemerintah sebagai regulator juga mengambil langkah untuk mengatasi tingginya pengangguran. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi para pencari kerja maupun pekerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 (Korber, 2019). Melalui Kartu Prakerja, pemerintah menyediakan akses pelatihan keterampilan, pelatihan ulang, dan peningkatan kompetensi agar angkatan kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri (Muhyiddin et al., 2022). Selain mendukung PEN, program ini

juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aloshyna et al., 2022). Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah peserta Program Kartu Prakerja terbanyak di Indonesia, dengan rincian dari tiap kabupaten/kota nya adalah sebagai berikut:



Sumber: statistik.prakerja.go.id (data diolah).

Gambar 1. 4 Jumlah Peserta Program Kartu Prakerja di Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Jumlah Orang).

Dari data di atas, diketahui bahwa terdapat fluktuasi jumlah peserta Program Kartu Prakerja di berbagai daerah. Kabupaten Sukabumi mengalami tren penurunan jumlah peserta dengan rata-rata penurunan sekitar 25.000 peserta setiap tahunnya, yang mengindikasikan menurunnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Sebaliknya, Kota Sukabumi menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten, dengan rata-rata kenaikan sekitar 10.000 peserta per tahun pada periode 2022-2024. Kondisi ini menggambarkan respons cepat masyarakat kota terhadap program peningkatan keterampilan, sekaligus menunjukkan bahwa pelatihan Prakerja dimanfaatkan untuk menghadapi keterbatasan lapangan kerja

formal melalui pengembangan wirausaha kecil, keterampilan digital, dan pekerjaan informal berbasis daring.

Berbeda dengan itu, wilayah penyangga DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi yang memiliki tingkat pengangguran rata-rata 8,5% justru menunjukkan partisipasi yang relatif rendah terhadap Program Kartu Prakerja, yakni sekitar 26.000 peserta per tahun. Hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara karakteristik tenaga kerja dan fokus pelatihan Prakerja. Banyak pengangguran terdidik di kawasan tersebut cenderung menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, sehingga kurang tertarik mengikuti pelatihan umum seperti kewirausahaan atau keterampilan digital dasar. Selain itu, akses mereka terhadap berbagai alternatif pelatihan dan jaringan kerja membuat ketergantungan terhadap program ini menjadi lebih rendah.

Di daerah industri seperti Karawang, Purwakarta, dan Subang, jumlah peserta Prakerja relatif stabil pada rata-rata 22.000 peserta setiap tahunnya, meskipun daerah tersebut memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi, yakni sekitar 8%. Pola ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja tidak hanya dimanfaatkan oleh penganggur, tetapi juga oleh pekerja industri sebagai sarana reskilling maupun dukungan pasca PHK. Sementara itu, daerah seperti Kuningan, Cirebon, dan Kota Tasikmalaya memperlihatkan peningkatan jumlah peserta dengan rata-rata 9.000 peserta pada tahun 2024, bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 1% pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Kartu Prakerja memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja, terutama di wilayah yang

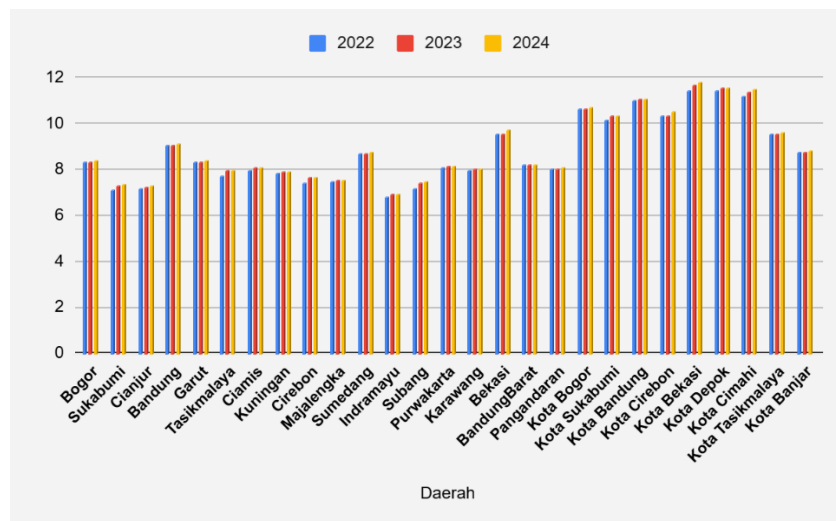
memiliki keterbatasan lapangan kerja formal dan masyarakat yang lebih terbuka terhadap pelatihan digital serta kewirausahaan mikro.

Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah peserta Program Kartu Prakerja tidak selalu sejalan dengan tingginya TPT. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik daerah, ketersediaan lapangan kerja, tingkat literasi digital, dan struktur ekonomi lokal. Meski demikian, tingginya partisipasi Prakerja di wilayah dengan TPT tinggi seperti Sukabumi dan Garut yang memiliki rata-rata sekitar 44.000 peserta per tahun dan TPT sekitar 7,5% dapat menjadi indikasi bahwa program ini berpotensi membantu menekan pengangguran, terutama apabila jenis pelatihannya lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja setempat.

Sejumlah penelitian mengenai program pelatihan serupa juga menegaskan bahwa peningkatan keterampilan melalui program semacam ini dapat memperkuat daya saing tenaga kerja dan membuka peluang lebih besar untuk masuk ke pekerjaan formal (Ilat et al., 2024). Namun, kondisi di Jawa Barat memperlihatkan paradoks: meskipun menjadi provinsi dengan jumlah peserta Prakerja terbanyak secara nasional, Jawa Barat tetap mencatat tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2024.

Selain pelatihan atau pendidikan informal, pendidikan formal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat pengangguran. Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa pendidikan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas individu, sehingga mereka lebih siap dan mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia

kerja. Data dibawah ini merupakan data tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah di 27 kab/kota di Jawa Barat tahun 2019-2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah).

Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Tahun).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat terus mengalami perbaikan sepanjang 2022–2024. Daerah kabupaten umumnya berada pada kisaran 7–8 tahun atau setara jenjang SMP, sedangkan kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, Depok, dan Cimahi mencapai 10–11 tahun. Kondisi ini menunjukkan akses pendidikan yang relatif lebih baik, meskipun belum memenuhi target wajib belajar 12 tahun. Di sisi lain, Kota Bekasi dan Kota Depok yang mencatat tingkat pengangguran cukup tinggi, yaitu sekitar 7–8%, justru memiliki RLS yang tinggi pula (11–12 tahun). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) tenaga kerja, di mana lulusan berpendidikan lebih tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

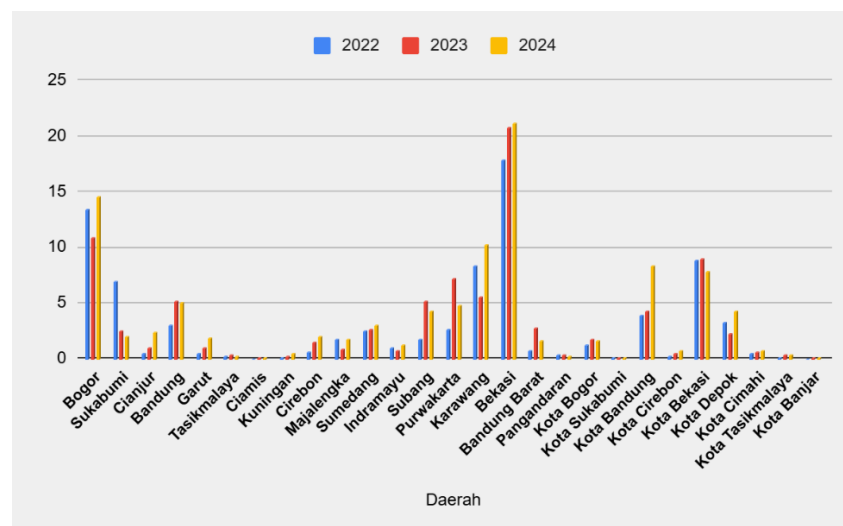
Sebaliknya, kabupaten seperti Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya yang memiliki RLS lebih rendah, yakni 7-10 tahun, justru mengalami penurunan tingkat pengangguran. Hal tersebut mencerminkan bahwa struktur ekonomi berbasis pertanian dan industri kecil di daerah tersebut mampu menyerap tenaga kerja lulusan menengah tanpa tuntutan pendidikan tinggi. Sementara itu, Kota Bandung dan Kota Bogor menunjukkan kombinasi yang lebih ideal, yakni RLS tinggi sekitar 11 tahun disertai penurunan tingkat pengangguran setiap tahunnya sebesar kurang lebih 1,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan lama sekolah mampu membantu mengurangi pengangguran ketika didukung oleh keterampilan individu serta ekosistem ekonomi yang kondusif.

Secara keseluruhan, grafik RLS di kabupaten/kota Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan meskipun kenaikannya relatif kecil, yaitu sekitar 0,02-0,3 tahun per periode. Perbaikan ini belum merata karena masih terdapat disparitas yang kuat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta tingkat literasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi membentuk individu yang kompeten, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah sebagai refleksi durasi pendidikan formal masyarakat. Berdasarkan *Human Capita Theory*, pendidikan menjadi investasi yang meningkatkan produktivitas dan kesiapan individu untuk masuk ke dunia kerja.

Namun demikian, Jawa Barat menunjukkan fenomena paradoks. Kota-kota dengan RLS tinggi seperti Depok, Bekasi, dan Cimahi tetap mencatat tingkat pengangguran yang cukup tinggi di kisaran 8-10%. Kondisi ini mengindikasikan adanya *mismatch* antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja (Todaro & Smith, 2020). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pendidikan tanpa perluasan kesempatan kerja yang memadai dapat memunculkan *educated unemployment*, yaitu pengangguran di kalangan terdidik akibat ketidaksesuaian kompetensi dan struktur permintaan tenaga kerja.

Sementara itu, faktor investasi dalam hal ini PMDN juga memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Adapun data realisasi penanaman modal dalam negeri di kab/kota Jawa Barat tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah)

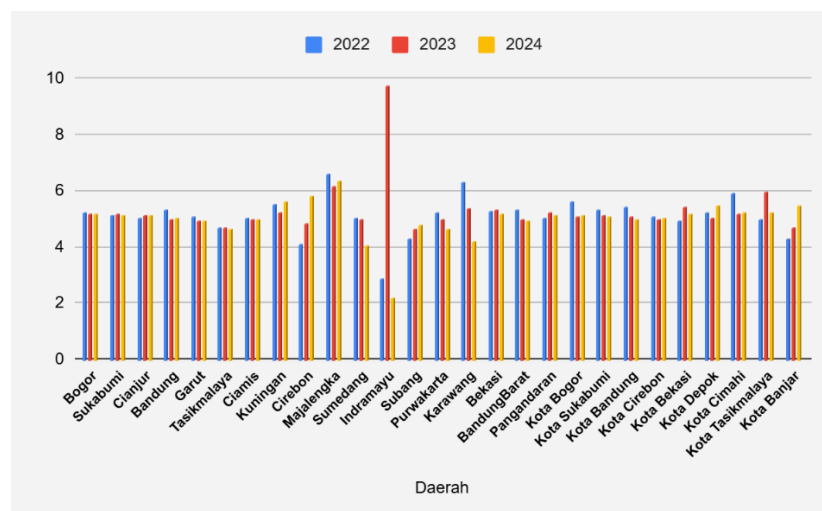
Gambar 1. 6 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah).

Dari data DPMPTSP di atas, terlihat adanya fluktuasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 27 kabupaten/kota selama periode 2022–2024. Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang, Bogor, dan Purwakarta mencatat realisasi PMDN tertinggi dengan rata-rata mencapai sekitar 11 triliun rupiah per tahun. Sebaliknya, daerah seperti Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, dan Sukabumi memiliki nilai PMDN relatif rendah, yakni sekitar 0,186 triliun rupiah atau 186 miliar rupiah per tahun. Menurut Bakar & Faisal (2022), PMDN berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Teori Harrod-Domar juga menjelaskan bahwa peningkatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi, sehingga menurunkan tingkat pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja baru. Fenomena ini terlihat di Kabupaten Bogor dan Karawang, di mana PMDN yang tinggi dengan rata-rata sekitar 11 triliun rupiah per tahun berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran yang mencapai sekitar 1% setiap tahunnya. Sebaliknya, Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi yang memiliki nilai PMDN lebih rendah, yaitu rata-rata 0,422 triliun rupiah atau 422 miliar rupiah per tahun, masih mencatat tingkat pengangguran yang cukup tinggi, yakni sekitar 8% per tahun. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran yang memiliki nilai PMDN relatif kecil, yaitu rata-rata 0,353 triliun rupiah atau 353 miliar rupiah per tahun, justru mampu menekan tingkat pengangguran hingga sekitar 1,5% setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur ekonominya yang berbasis pertanian.

Secara keseluruhan, distribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Barat masih belum merata, dengan tren meningkat di kawasan industri seperti

Bekasi, Karawang, Bogor, dan Purwakarta, tetapi menurun di wilayah pedesaan dan Priangan Timur seperti Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Ciamis. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur lebih baik dan tenaga kerja terdidik lebih mampu menarik investor dibandingkan wilayah agraris dengan pendidikan lebih rendah. Meskipun peningkatan PMDN di beberapa daerah berhasil menekan pengangguran, sebagian besar investasi metropolitan bersifat padat modal dan menyerap tenaga kerja terbatas, sedangkan wilayah pertanian dengan PMDN rendah mampu menjaga pengangguran tetap rendah melalui sektor padat karya. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas PMDN dalam mengurangi pengangguran sangat bergantung pada kesesuaian sektor investasi dengan karakteristik tenaga kerja dan kondisi ekonomi lokal. Oleh karena itu, peningkatan PMDN sebaiknya difokuskan pada sektor padat karya dan tidak hanya terpusat di wilayah metropolitan, tetapi juga diarahkan ke daerah dengan tingkat pengangguran tinggi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Selain PMDN, laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor makro ekonomi lain yang dapat menurunkan tingkat pengangguran.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

Gambar 1. 7 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2022-2024 (%)

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami penurunan dari 5,45% pada 2022 menjadi 4,95% pada 2024 menunjukkan bahwa pemulihan pasca pandemi belum sepenuhnya stabil. Di balik angka tersebut, tiap wilayah memperlihatkan dinamika yang berbeda. Indramayu, misalnya, sempat mencatat lonjakan hampir 10% pada 2023 yang disebabkan oleh belanja daerah yang efektif dan aktivitas panen raya yang menjadikan Indramayu sebagai daerah pusat pangan nasional, namun peningkatan ini tidak diikuti penurunan pengangguran karena bersumber dari aktivitas musiman yang tidak menciptakan lapangan kerja berkelanjutan (Sugandi et al., 2024). Sebaliknya, Majalengka mempertahankan pertumbuhan yang lebih konsisten dan berhasil menekan pengangguran hingga sekitar 4%, sehingga menunjukkan struktur ekonomi yang lebih mampu menyerap tenaga kerja.

Di kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, Depok, dan Cimahi, pertumbuhan ekonomi berjalan stabil namun relatif datar di angka $\pm 5,26\%$.

Dominasi sektor padat modal membuat efisiensi produksi meningkat, tetapi peluang kerja baru tidak tumbuh secepat ekspansi ekonominya. Sementara itu, daerah dengan basis agraris dan padat karya seperti Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya menunjukkan pola berbeda. Meski laju pertumbuhannya tidak tinggi yaitu berkisar $\pm 5\%$, struktur sektor yang lebih menyerap tenaga kerja membuat wilayah-wilayah ini mampu menjaga tingkat pengangguran tetap rendah dan stabil.

fenomena ini menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran tidak selalu berjalan searah. Struktur ekonomi lokal memainkan peran besar dalam menentukan seberapa jauh pertumbuhan mampu menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu, variabel LPE menjadi penting dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat benar-benar berkontribusi pada penurunan pengangguran di tiap wilayah, baik melalui ekspansi kegiatan produksi maupun melalui penciptaan peluang kerja yang lebih merata.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah ada membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Namun, terdapat perbedaan cakupan lokasi yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Seperti (Adam et al., 2025) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa program Prakerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2023, namun hal ini berbeda dengan penelitian (Mutiah et al., 2025) yang menjelaskan bahwa kartu prakerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan pengangguran. Selain itu, dalam penelitian (Fatmawati & Guk, 2024), dijelaskan bahwa variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat

pengangguran di Jawa Barat, sementara (Juniardi & Nurhayati, 2023) dalam penelitiannya yaitu Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2017-2021 menemukan bahwa RLS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Untuk variabel PMDN pada penelitian (Afrizal, 2015) ditemukan bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi dijelaskan pada penelitian (Ardian et al., 2022) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Mifrahi, 2022) yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.

Dari penelitian sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa terdapat kekosongan (research gap). Kekosongan atau kesenjangan ini terlihat dari terdapat perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dalam penelitian-penelitian sebelumnya sebelumnya yang memiliki topik sejenis. Beberapa penelitian menunjukkan temuan yang berbeda-beda, dengan beberapa menunjukkan hubungan positif antara variabel, sementara yang lain menunjukkan hubungan negatif atau tidak signifikan, kemudian pada lokasi penelitian kebanyakan berada pada lokasi nasional, ataupun provinsi masih jarang yang meneliti di kota/kabupaten terutama untuk variabel Kartu Prakerja.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *novelty* (kebaruan) yaitu terletak pada lokasi penelitian dan periode untuk variabel Kartu Prakerja yang berada di 27

kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2020-2024. Selain itu, penelitian ini menggunakan kombinasi variabel seperti Kartu Prakerja, Rata-Rata Lama Sekolah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara bersamaan, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Serta periode penelitian ini berfokus pada tahun-tahun terkini, di mana dinamika ekonomi dan sosial mengalami perubahan signifikan, sehingga diharapkan penggunaan keempat variabel tersebut secara bersamaan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang berisikan fenomena yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Program Kartu Prakerja, Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2020-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terbuka, program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN, dan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN, dan laju pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2020-2024?

3. Bagaimana pengaruh program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN dan laju pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran Terbuka di Jawa Barat tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terbuka, program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN, dan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN, dan laju pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN dan laju pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya di Jawa Barat.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Adapun kegunaan penelitian dalam pengembangan ilmu antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat novelty dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel program kartu prakerja sebagai determinan dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat periode 2020-2024 yang selama ini belum pernah diteliti.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi dengan mengintegrasikan variabel program kartu prakerja, rata-rata lama sekolah, PMDN, dan laju pertumbuhan ekonomi ke dalam analisis empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat periode 2020-2024.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan strategi yang lebih efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan daerah

Sebagai rujukan untuk evaluasi kebijakan program kartu prakerja, masukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat, pemerataan realisasi penanaman modal dalam negeri dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi penelitian lanjutan baik dalam lingkungan kampus maupun luar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

3. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Daerah

Sebagai informasi dan masukan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan daerah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jawa Barat, data diperoleh dari website BPS Provinsi Jawa Barat, Website Kartu Prakerja (Prakerja.go.id), dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dan mulai diterbitkannya SK pembimbing. Adapun rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

